

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul:

**PENERAPAN *E-BILLING* SYSTEM DALAM PEMBAYARAN PPH PASAL 21
(Studi Pada Universitas Negeri Gorontalo)**

Oleh

SAFITRI S. HAMIDUN
NIM. 921 414 014

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Tri Handayani Amaliah, SE., Ak., M.Si
NIP. 19721207 200312 2 001

Pembimbing II



Ayu Rakhma Wuryandini, SE., M.SA
NIP. 19820217 201504 2 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Zulkifli Boku, SE., Ak., M.Si
NIP. 19720519 200212 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi yang berjudul:
Penerapan E-Billing System Dalam Pembayaran PPH Pasal 21
(Studi Pada Universitas Negeri Gorontalo)**

Oleh:

SAFITRI S. HAMIDUN





NIM: 921 414 014

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juli 2018

Waktu : 11.00 WITA

Penguji:

1. Imran Rosman Hambali, S.Pd., SE., MSA 1. 
2. Ronald S. Badu, SE., MSA 2. 
3. Dr. Tri Handayani Amaliah, SE., Ak., M.Si 3. 
4. Ayu Rakhma Wuryandini SE., MSA 4. 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Gorontalo



Imran Rosman Hambali, S.Pd, SE, MSA

NIP: 19700823 199903 1 005

ABSTRAK

Safitri S. Hamidun, Nim 921 414 014. 2018. “Penerapan *E-Billing* System Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 (Studi Pada Universitas Negeri Gorontalo) Program Studi S1 Akuntansi, Konsentrasi Pajak, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Ibu Dr. Tri Handayani Amaliah,SE,AK.M.Si Selaku Pembimbing I dan Ibu Ayu Rakhma Wuryandini,SE.,MSA Selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan *E-Billing* System Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Di Universitas Negeri Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menerapkan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Univesitas Negeri Gorontalo sudah menerapkan pembayaran pajak dengan *E-Billing* sejak 1 Juli 2016 pembayaran dilakukan di Bank persepsi. Penerapan *E-Billing* sangat membantu bendahara pengeluaran dalam mempercepat proses pembayaran pajak yang lebih mudah, cepat, dan akurat. Tapi, untuk pembayaran PPh Pasal 21 yang dikelola oleh bendahara gaji tidak memiliki bukti potong dan setor pajak. Terdapat kendala yang dihadapi oleh bendahara pengeluaran dalam penerapan sistem *E-Billing* adalah sering terjadi kesalahan dalam menginput data dan lemahnya akses ke sistem DJP karena kepadatan pengguna. Sistem *E-Billing* sangat efektif dan efisien digunakan oleh semua kalangan wajib pajak atau pemungut pajak daripada menggunakan Surat Setoran Pajak

Kata Kunci : *E-Billing*, Wajib Pajak, Pajak PPh Pasa 21,Surat Setoran Pajak.

ABSTRACT

Safitri S. Hamidun, Student ID 921 414 014. 2018. "The Application of E-Billing System in Payments of PPh (Income Tax) Article 21 (Study at State University of Gorontalo)" Bachelor Study Program of Accounting, Tax Concentration, Department of Accounting, Faculty of Economics, State University of Gorontalo. The principal supervisor is Dr. Tri Handayani Amaliah, SE, AK.M.Si, and the co-supervisor is Ayu Rakhma Wuryandini, SE., MSA.

The purpose of this study was to find out the application of PPh Article 21 payments at State University of Gorontalo. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. Sampling technique used Purposive Sampling. The data collection in this study was performed by applying interview techniques, observation techniques, and documentation techniques.

The findings indicate that State University of Gorontalo already applied for tax payment with E-Billing since July 1, 2016 payments made in the bank's perception. The application of E-Billing really helps the treasurer's expenses in speeding up the tax payment process easier, faster, and more accurate. However, for the payment of Article 21 PPH administered by the treasurer does not have proof of tax deduction and tax. There are constraints faced by the treasurer of expenditure in the application of the E-Billing system such as; it is often a mistake in input data and weak access to the DJP system because of the density of users. All taxpayers or tax collectors effectively and efficiently use e-billing System rather than using Tax Payments Letters.

Keywords : E-Billing, Taxpayer, Tax of PPh Article 21, Tax Payments Letters